



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

ANCAMAN KRISIS UTANG DI TENGAH RISIKO RESESI GLOBAL

Edmira Rivani

Analisis Legislatif Ahli Madya
edmira.rivani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Peningkatan utang menjadi salah satu ancaman bagi perekonomian dunia tahun ini. Pinjaman sejumlah negara membengkak dan membuka peluang terjadinya krisis utang karena kecilnya kemampuan negara terkait untuk membayar kewajibannya, yang terjadi di tengah kompleksnya kondisi inflasi global dan tingginya tingkat suku bunga acuan mayoritas bank sentral di dunia. Hal tersebut kemungkinan akan memberikan dampak tidak hanya resesi tetapi potensi *debt crisis* di berbagai negara yang saat ini tingkat utangnya sangat tinggi.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi salah satu tantangan global yang akan terjadi pada tahun 2023. Dana Moneter Internasional (IMF) juga memprediksi 40% ekonomi negara-negara dunia mengalami resesi tahun ini. Bahkan saat ini sebanyak 63 negara berada dalam kondisi peningkatan utang yang signifikan, mendekati batas maksimal syarat keberlanjutan utang. Karenanya, lembaga pemberi pinjaman itu juga mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2023 menjadi 2,7%. Angka itu lebih rendah dari proyeksi pertumbuhan di 2021 yang mencapai 6,0%, dan 2022 di angka 3,2%. Jadi pada tahun ini, kita tidak hanya menghadapi inflasi dan kemungkinan resesi, tapi juga masalah dengan *debt sustainability* di berbagai negara.

Sejumlah negara yang mulai menghadapi peningkatan beban utang terutama berada di kawasan Asia Selatan. Negara seperti Bangladesh dan Pakistan menghadapi tantangan pengelolaan utang yang tidak kalah berat dari Sri Lanka yang kini dalam kondisi krisis. Beberapa negara importer minyak dunia juga memiliki peluang menghadapi tantangan sulit. Analisis IMF pada Oktober tahun lalu menunjukkan lebih dari separuh daftar 69 negara miskin telah dan akan gagal membayar utangnya. Delapan di antaranya sudah dinyatakan *default* alias gagal bayar utang, sedangkan 29 negara terancam tidak sanggup membayar kewajibannya. Negara-negara rapuh ini yang ruang fiskal dan moneternya bahkan sudah terbatas sebelum pandemi, semakin melemah oleh beberapa gejala baru-baru ini. Defisit transaksi berjalan dan posisi cadangan devisa secara umum memburuk, meskipun beberapa diuntungkan dari reli komoditas. Adapun 8 negara yang sudah dinyatakan gagal bayar adalah Chad, Republik Kongo, Grenada, Mozambik, Sao Tome dan Principe, Somalia, Sudan dan Zimbabwe.

Kondisi Indonesia sendiri, berdasarkan laporan International Debt Report 2022 yang dirilis Bank Dunia, memiliki utang luar negeri paling besar di antara negara berpendapatan menengah-bawah Asia Tenggara. Menurut laporan tersebut, pada 2021 Indonesia memiliki total utang luar negeri sebanyak US\$416,47 miliar, jauh melampaui utang negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste dimana masing-masing total utang luar negeri sebanyak US\$211 miliar, US\$136,2 miliar, US\$106,4 miliar, US\$20 miliar, US\$17,2 miliar, US\$13,9 miliar, dan US\$278 juta.

Meskipun memiliki utang luar negeri paling besar di antara negara Asia tenggara lainnya, kondisi utang Indonesia tergolong masih relatif aman. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga akhir November 2022 posisi utang Indonesia berada di level Rp7.554,5 triliun, naik sebesar Rp57,55 triliun dari bulan sebelumnya. Nilai tersebut menjadikan rasio utang Indonesia sebesar 38,65% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu turun bila dibandingkan dengan era pandemi Covid-19 yang sempat menembus 40% terhadap PDB. Rasio utang itu disebut masih cukup aman dari batas maksimal berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni 60% terhadap PDB. Meski terbilang relatif aman, pemerintah harus mewaspadai tingkat utang Indonesia.

Atensi DPR

Peningkatan beban utang yang menimpa sejumlah negara tentu saja tidak diinginkan terjadi di Indonesia. Karenanya, pemerintah perlu melaksanakan konsolidasi fiskal melalui penurunan angka defisit anggaran. Dengan menekan defisit anggaran, penarikan utang dapat dikendalikan dan dijaga di level yang tetap aman. Upaya konsolidasi fiskal itu akan tercermin dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana defisit anggaran tahun ini dipatok berada di level 2,84% terhadap PDB, dikarenakan penetapan defisit APBN melebihi 3% diatur hanya sampai pada tahun 2022 yang merupakan kebijakan khusus dalam menangani pandemi Covid-19. DPR RI, dalam hal ini Komisi XI perlu mengawasi defisit anggaran tersebut sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana defisit anggaran maksimal sebesar 3% pada tahun 2023.

Sumber

cnnindonesia.com, 09 Januari 2023;
katadata.co.id, 09 Januari 2023;
Media Indonesia, 09 Januari 2023;
nasional.kontan.co.id, 09 Januari 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Riyadi Santoso
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023